



# BIMTEK ANALISYS DATA TERPILAH GENDER {SIGA} TAHUN 2022

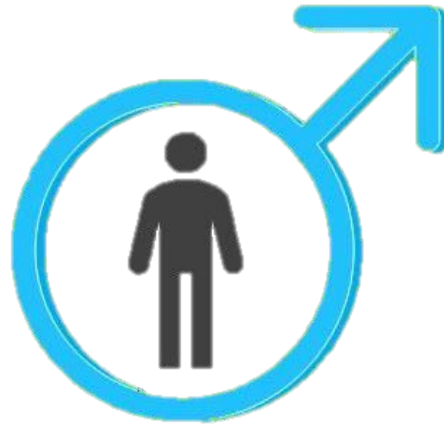
**Kadis, SE.MM**

Statistisi Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan  
Provinsi Jawa Timur

Madiun 14-15 Juni 2022

# Kebijakan Data Terpilah



# **DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK**

## **Data Terpilah**

□ (bisa: umur; urban-rural; pendidikan; agama; suku bangsa, atau jenis kelamin). Biasanya untuk **mengungkapkan pola, kecenderungan & informasi lain yang dibutuhkan.**

## **Data Terpilah Gender dan Anak**

□ Pemilahan antara laki dan perempuan dan anak untuk melihat kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

### **CONTOH DATA TERPILAH GENDER :**

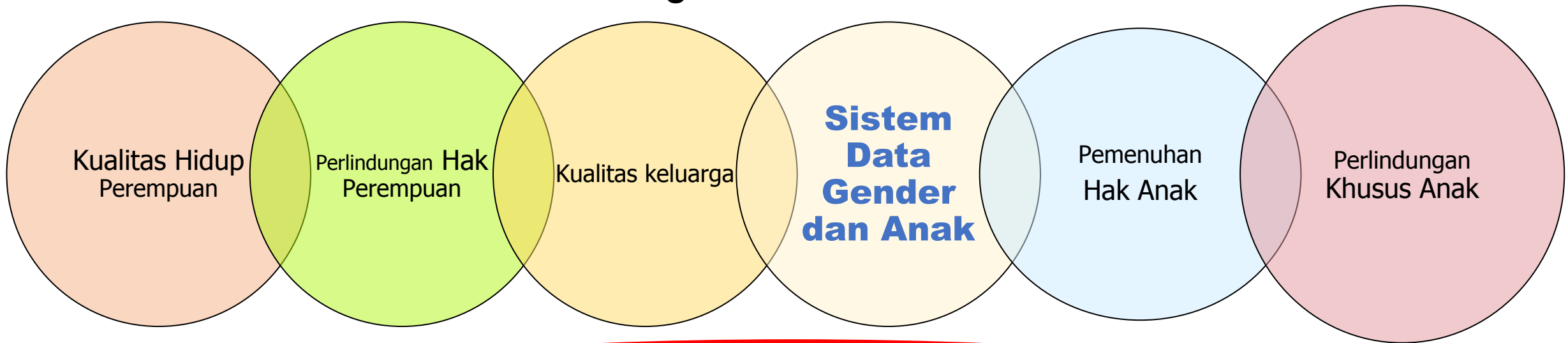
- **JUMLAH KELULUSAN LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**
- **RASIO GURU LAKI DAN PEREMPUAN YANG TERSERTIFIKASI,**
- **RASIO PESERTA KB LAKI DAN PEREMPUAN,**
- **RASIO PEDAGANG LAKI DAN PEREMPUAN DI PASAR WONOKROMO**

# UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



URUSAN PPPA  
MERUPAKAN **URUSAN WAJIB KONKUREN** NON LAYANAN  
DASAR

dengan 6 Sub-Urusan



Permen PPPA no 5 tahun 2014 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender  
dan Anak

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	2	3	4	5
			anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.	kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<p>a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.</p> <p>b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.</p>	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.

# Tujuan dan Manfaat Membangun Data Terpilah

## Tujuan :

1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak untuk melihat Hasil Pembangunan Berbasis Gender.
2. Memperkuat dan mendorong penyusunan sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;

## Manfaat :

1. Dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pembangunan di daerah atau dibidang tertentu sudah responsif gender
2. Mendorong pencapaian kesetaraan gender

# PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN **AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT BAGI PEREMPUAN DAN KELOMPOK SOCIAL INKLUSI**, BERTUJUAN UNTUK KESETARAAN GENDER  
*(GENDER EQUALITY)*

DENGAN STRATEGI PENGARUSUUTAMAN GENDER (PUG)

## INDIKATOR KINERJA

- IPM LAKI DAN PEREMPUAN
- INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
- INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
- MENURUNNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DATA TERPILIH

# TUGAS POKJA PUG

(Permendagri 67/2011)

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
- 4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;**
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- 8. Menyusun Profil Gender Provinsi;**
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan



# DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

## Data Terpilah

(bisa: umur; urban-rural; pendidikan; agama; suku bangsa, atau jenis kelamin).  
Biasanya untuk **mengungkapkan pola, kecenderungan & informasi lain yang dibutuhkan.**

## Data Terpilah Gender dan Anak

Pemilahan antara laki dan perempuan dan anak untuk **melihat kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.**

### CONTOH DATA TERPILAH GENDER :

- JUMLAH KELULUSAN LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
- RASIO GURU LAKI DAN PEREMPUAN YANG TERSERTIFIKASI,
- RASIO PESERTA KB LAKI DAN PEREMPUAN,
- RASIO PEDAGANG LAKI DAN PEREMPUAN DI PASAR

# CONTOH ISU-ISU GENDER □ ITU APA SAJA ?

**IPM**

MASALAH  
KESEHATAN



MASALAH  
PENDIDIKAN



MASALAH  
EKONOMI



1. TINGGINYA PERKAWINAN ANAK, HAMIL DULUAN, DISPENSASI PERKAWINAN
2. TINGGINYA KEMATIAN IBU/BAYI
3. TINGGINYA KURANG GIZI / STUNTING
4. PEREMPUAN KEPALA KELUARGA TAK MAMPU
5. KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK (KBG)
6. TINGGINYA ANGKA PUTUS SEKOLAH
7. RENDAHNYA PEREMPUAN PARLEMEN. PEREMPUAN PROFESIONAL
8. PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN BERMASALAH
9. PENGASUHAN ANAK
10. ANAK TERLANTAR
11. KEIKUTSERTAAN DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN
12. BELUM ADANYA KETERLIBATAN KAUM LELAKI DALAM KB
13. DLL

# 5 (LIMA) ARAHAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN terkait isu gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam  
kewirausahaan;

1

Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam  
Pendidikan atau pengasuhan anak

2

Penurunan kekerasan terhadap  
perempuan dan anak

3

Penurunan pekerja anak

4

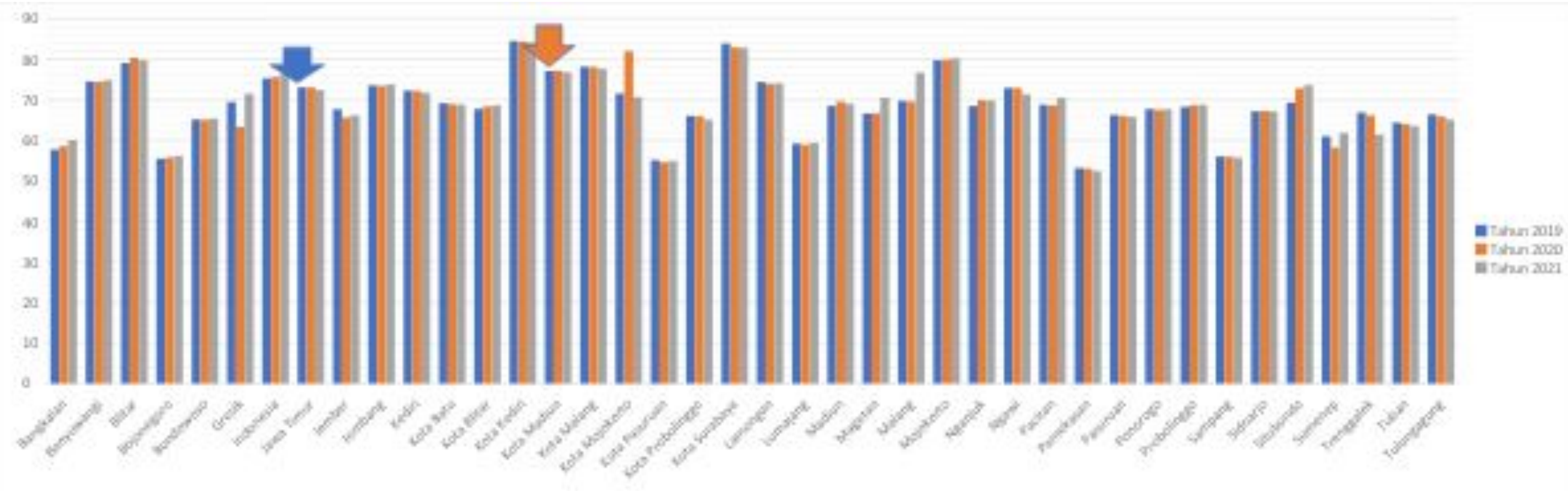
Pencegahan perkawinan anak;

5



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

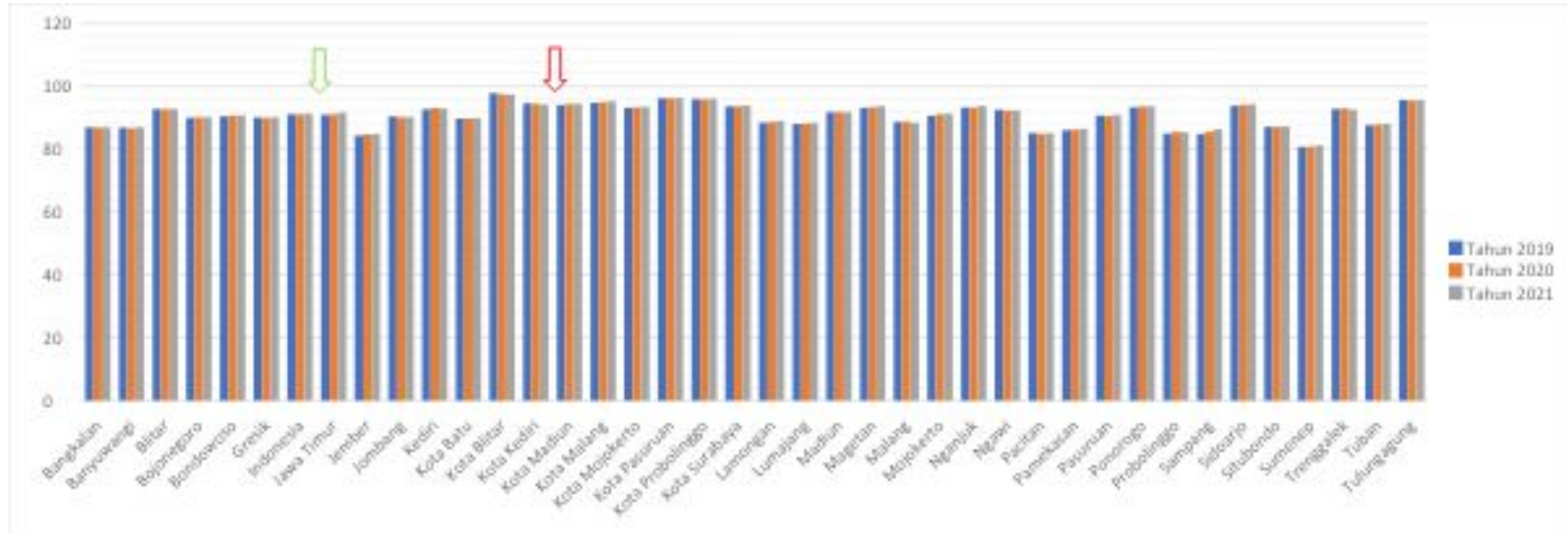
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Turun
<b>Kota Madiun</b>	77,07	77,18	76,75	0,43
<b>Jawa Timur</b>	73,04	73,03	72,36	0,97

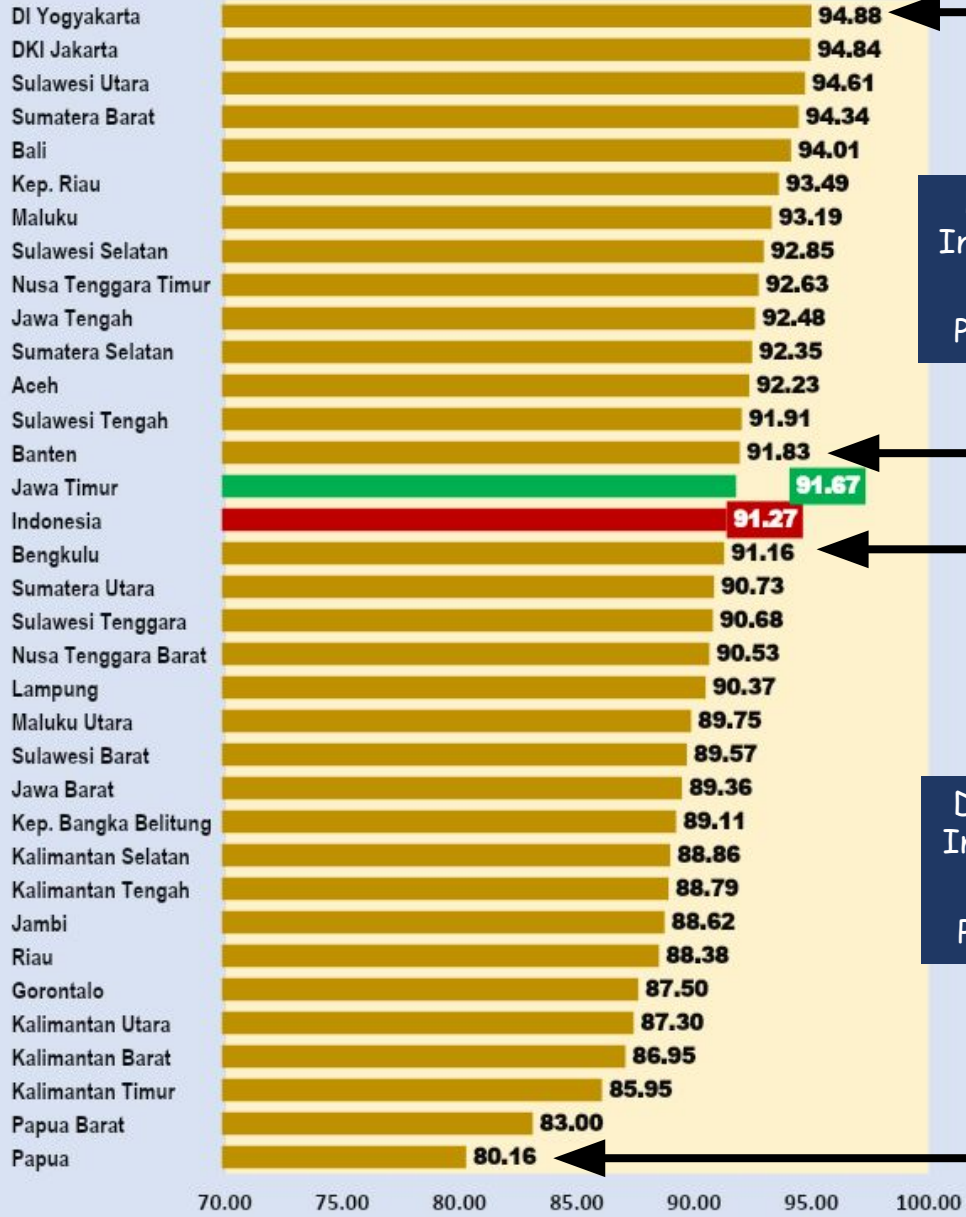
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

MENURUT KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	naik
<b>Kota Madiun</b>	94,05	94,38	94,42	0,4
<b>Jawa Timur</b>	90,91	91,07	91,67	0,6

# IPG NASIONAL TAHUN 2021



# IPG 2021

## INDIKATOR KESETARAAN GENDER

Diatas Indonesia  
**15**  
Provinsi

Diatas Jatim  
**18**  
Kab/Kota

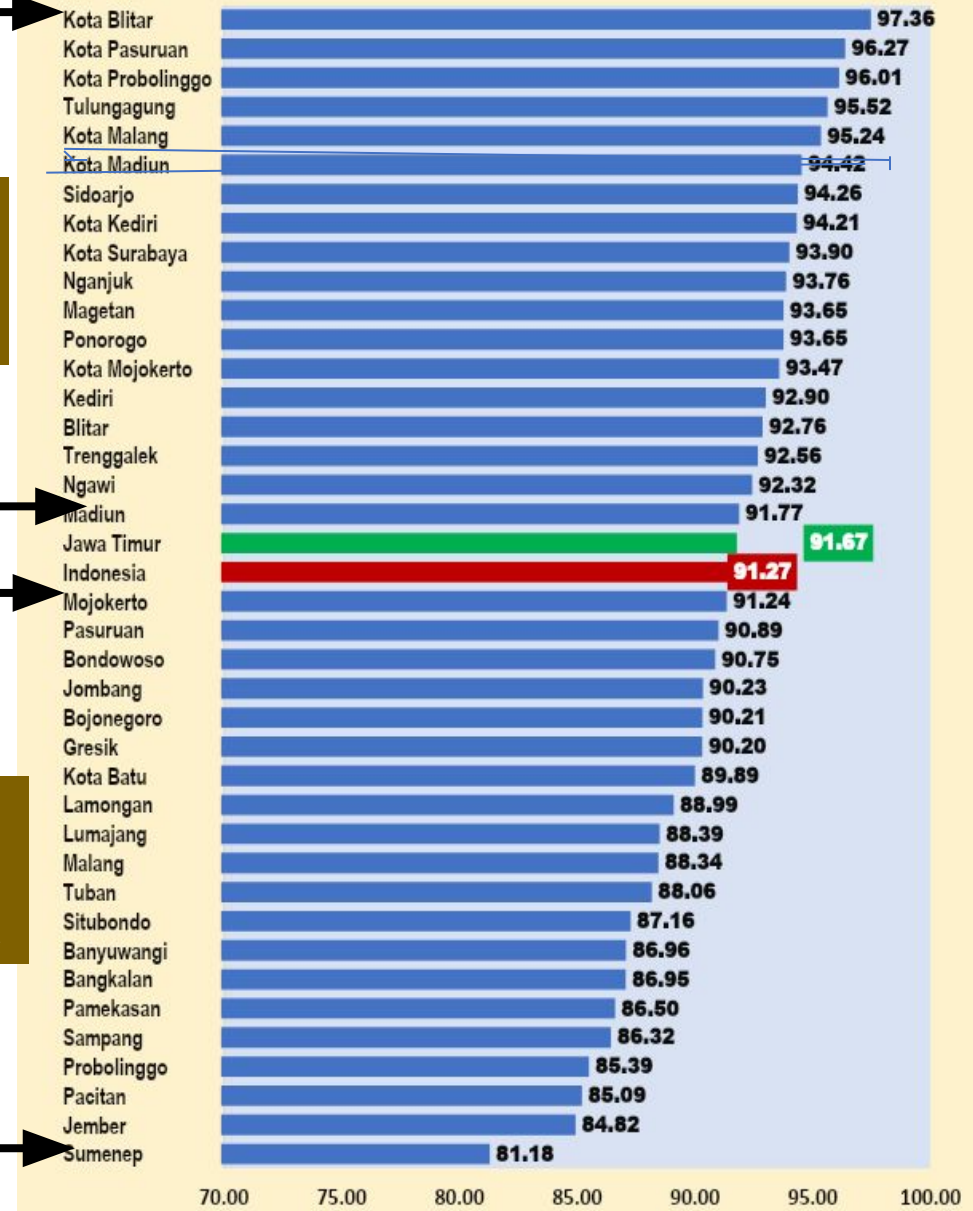
## INDEKS PEMBANGUNAN GENDER INDIKATOR KINERJA KEPALA

Dibawah Indonesia  
**19**  
Provinsi

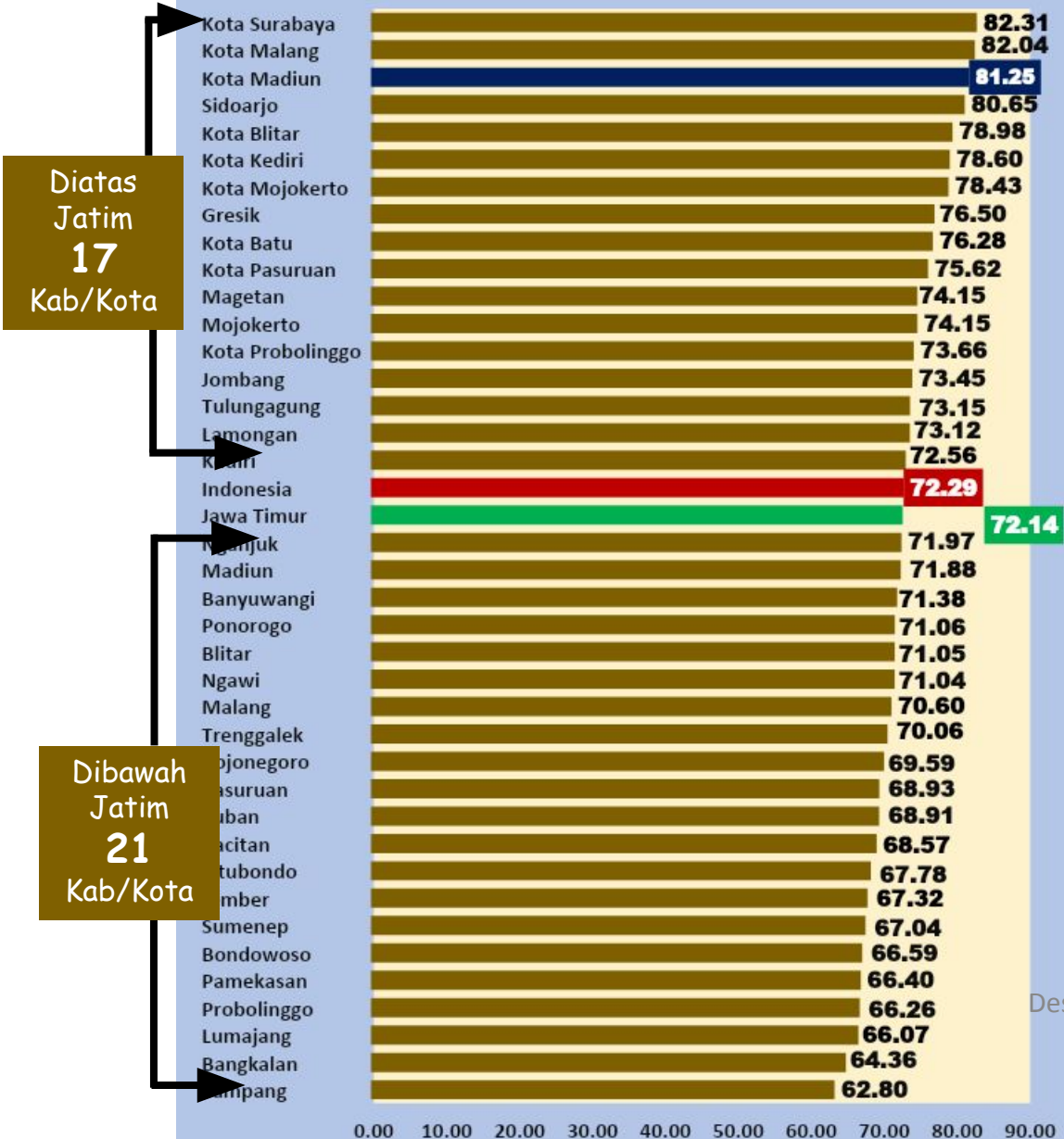
Dibawah Jatim  
**18**  
Kab/Kota

Sumber : bps.go.id

# IPG JAWA TIMUR TAHUN 2021



## IPM JAWA TIMUR TAHUN 2021



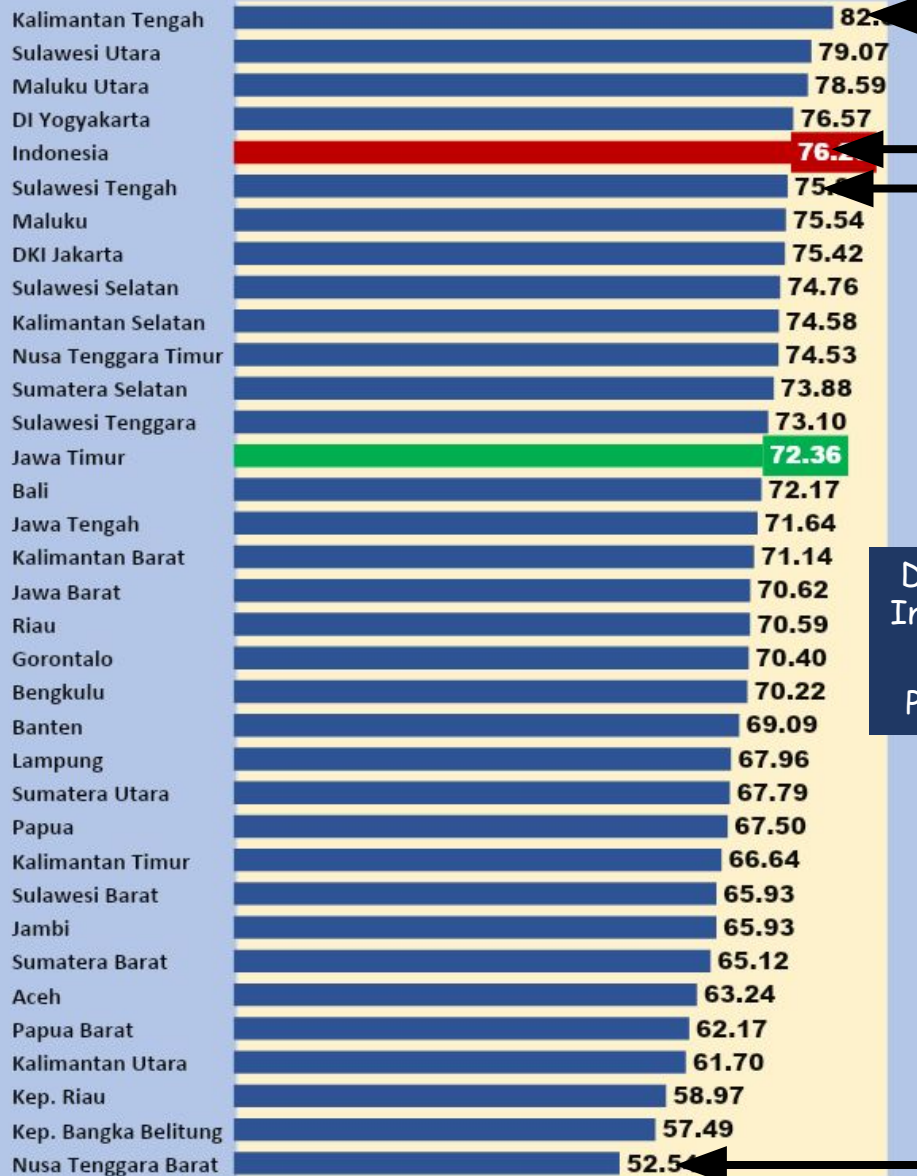
Sumber : bps.go.id

**IPM 2021** → **81,25**

**KOTA MADIUN  
PERINGKAT 3  
Se Jawa Timur**

Design by HK 2022

## IDG NASIONAL TAHUN 2021



## IDG 2021

### INDIKATOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Diatas  
Indonesia  
4  
Provinsi

Diatas  
Jatim  
11  
Kab/Kota

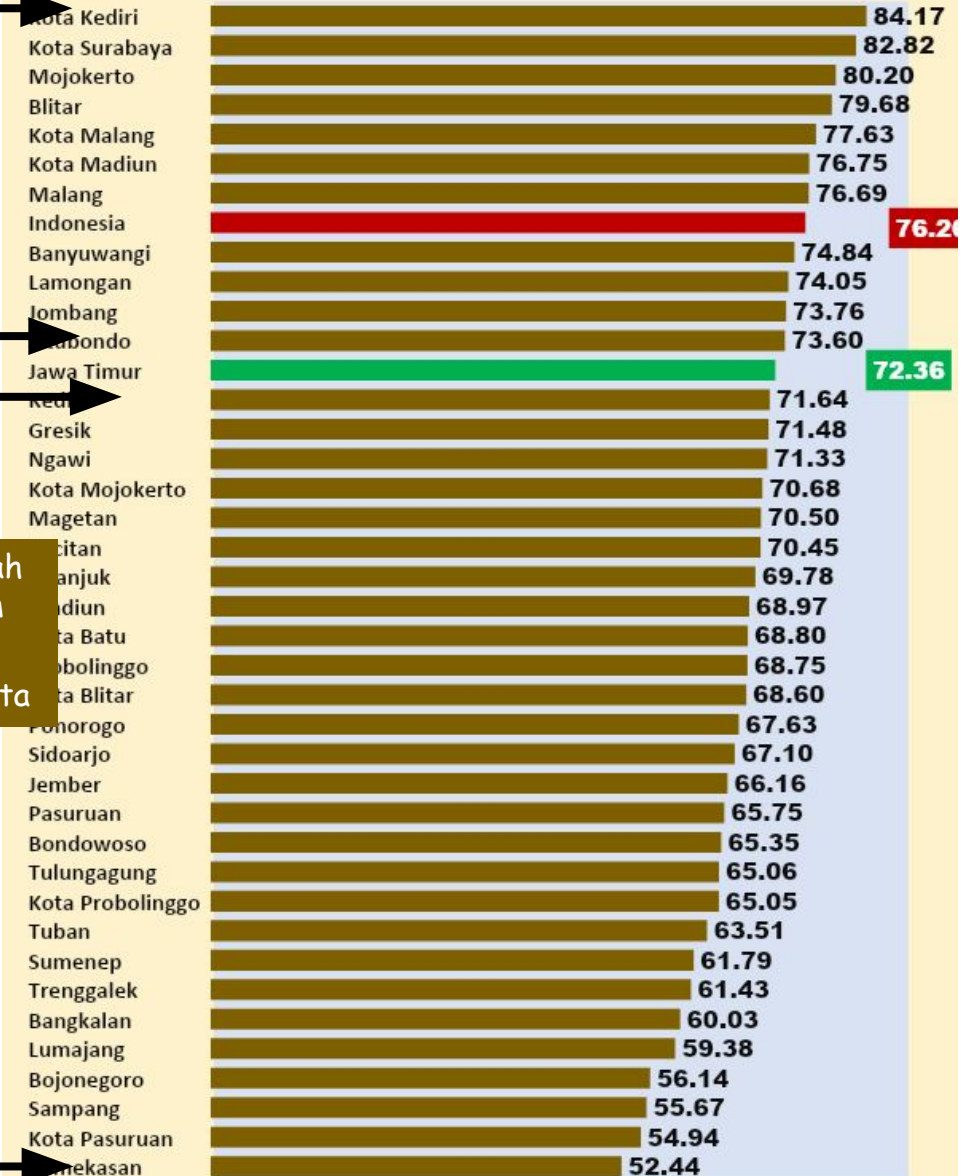
Dibawah  
Indonesia  
30  
Provinsi

Dibawah  
Jatim  
27  
Kab/Kota

### INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER INDIKATOR KINERJA DAERAH

Sumber : bps.go.id

## IDG JAWA TIMUR TAHUN 2021





# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA MADIUN

# 2021

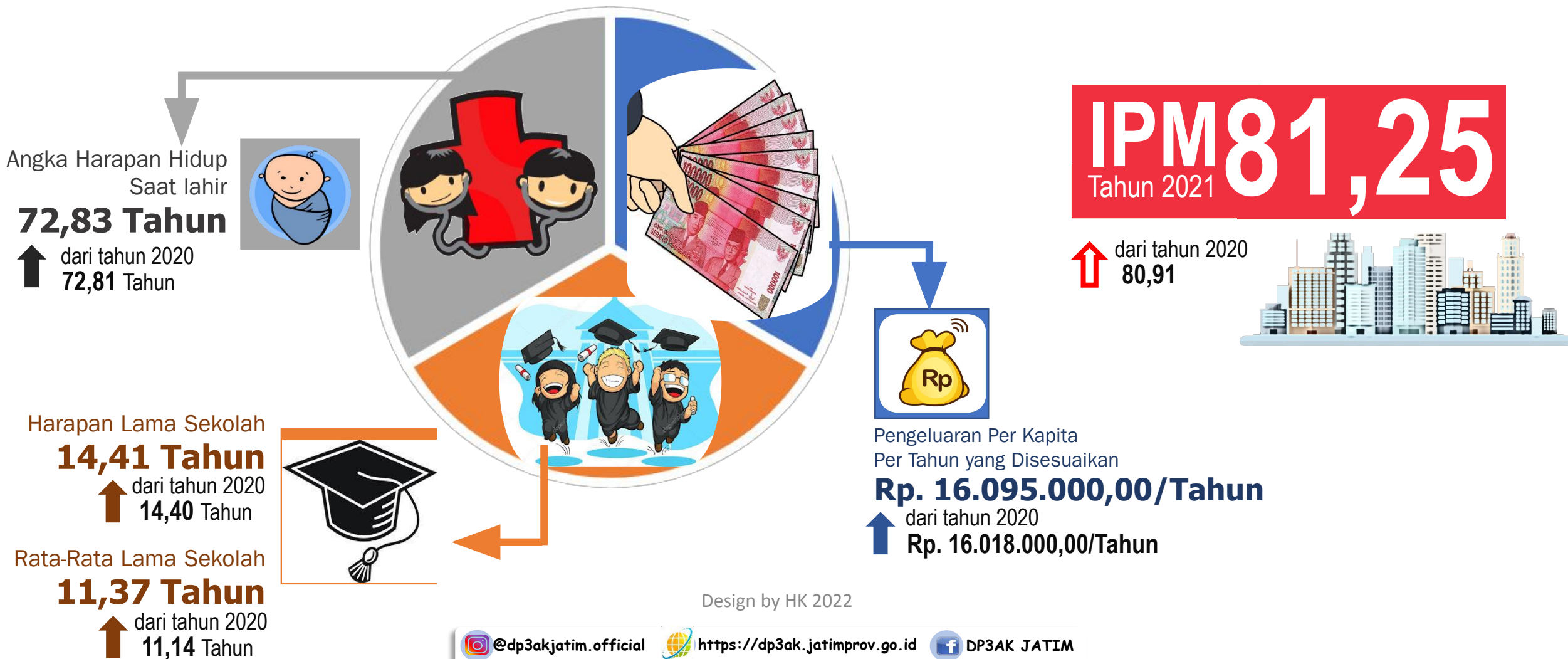
Sumber : bps.go.id



#bangga  
melayan  
bangsa

OPTIMIS  
JATIM BANGKIT

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Samudra Layak Aspiratif Kolaboratif



@dp3akjatim.official



<https://dp3ak.jatimprov.go.id>



DP3AK JATIM

# INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA MADIUN TAHUN 2021

Sumber : bps.go.id

**IPG 2021**

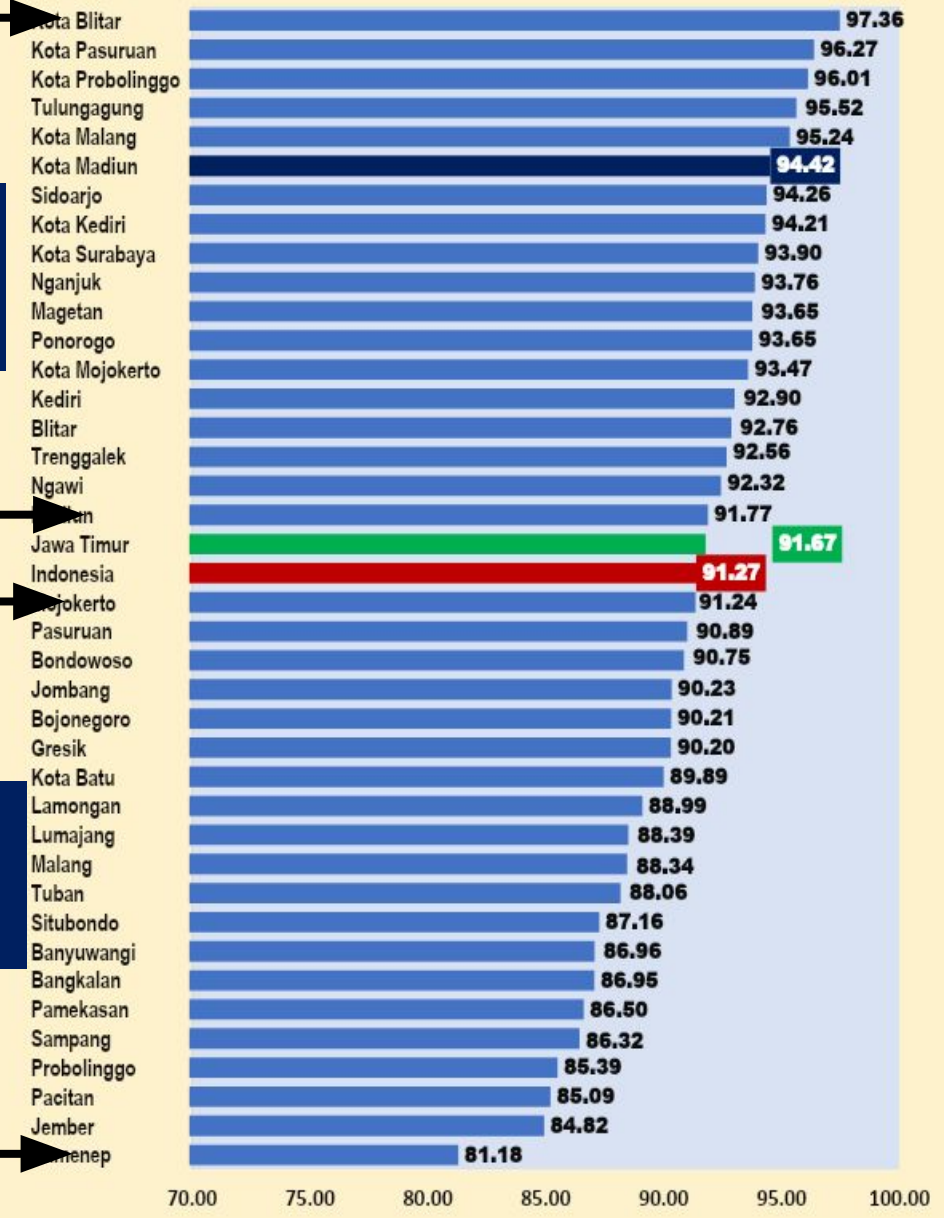
**94,42**

**KOTA MADIUN  
PERINGKAT 6  
Se Jawa Timur**

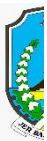
## IPG JAWA TIMUR TAHUN 2021

Diatas  
Jatim  
18  
Kab/Kota

Dibawah  
Jatim  
20  
Kab/Kota



Design by HK 2022



# INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA MADIUN

# 2021

Sumber : bps.go.id



## Kegunaan

Indeks Pembangunan Gender menggambarkan **kesenjangan** pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan

**IPG**

**94,42** ↑ dari tahun 2020 **94,38**

## Interpretasi



Semakin IPG mendekati angka 100 maka semakin kecil **kesenjangan** pembangunan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan

**Angka Harapan Hidup**

**74,69** Tahun ↑ dari tahun 2020 **74,67** Tahun

**Harapan Lama Sekolah**

**14,86** Tahun ↑ dari tahun 2020 **14,85** Tahun

**Rata – Rata Lama Sekolah**

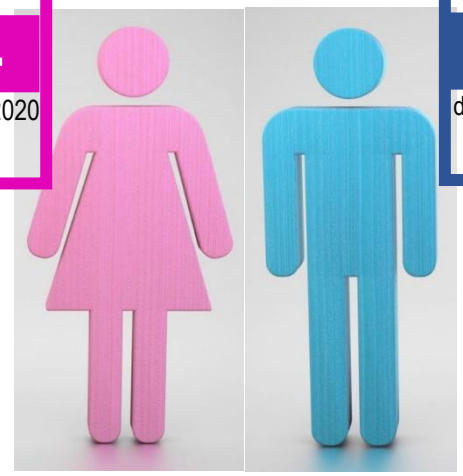
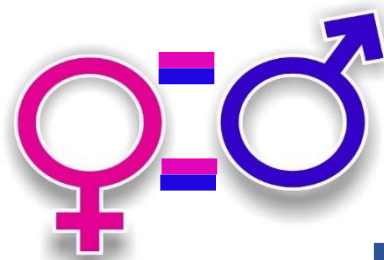
**10,92** Tahun ↑ dari tahun 2020 **10,67** Tahun

**Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan**  
(dalam Ribu Rupiah PPP)

**15.455.000/Tahun** ↑ dari tahun 2020 **15.397.000/Th**

**IPM**

**80,44** ↑ dari tahun 2020 **80,09**



**IPM**

**85,19** ↑ dari tahun 2020 **84,86**

**Angka Harapan Hidup**

**70,89** Tahun ↑ dari tahun 2020 **70,85** Tahun

**Harapan Lama Sekolah**

**14,35** Tahun ↑ dari tahun 2020 **14,34** Tahun

**Rata – Rata Lama Sekolah**

**11,83** Tahun ↑ dari tahun 2020 **11,68** Tahun

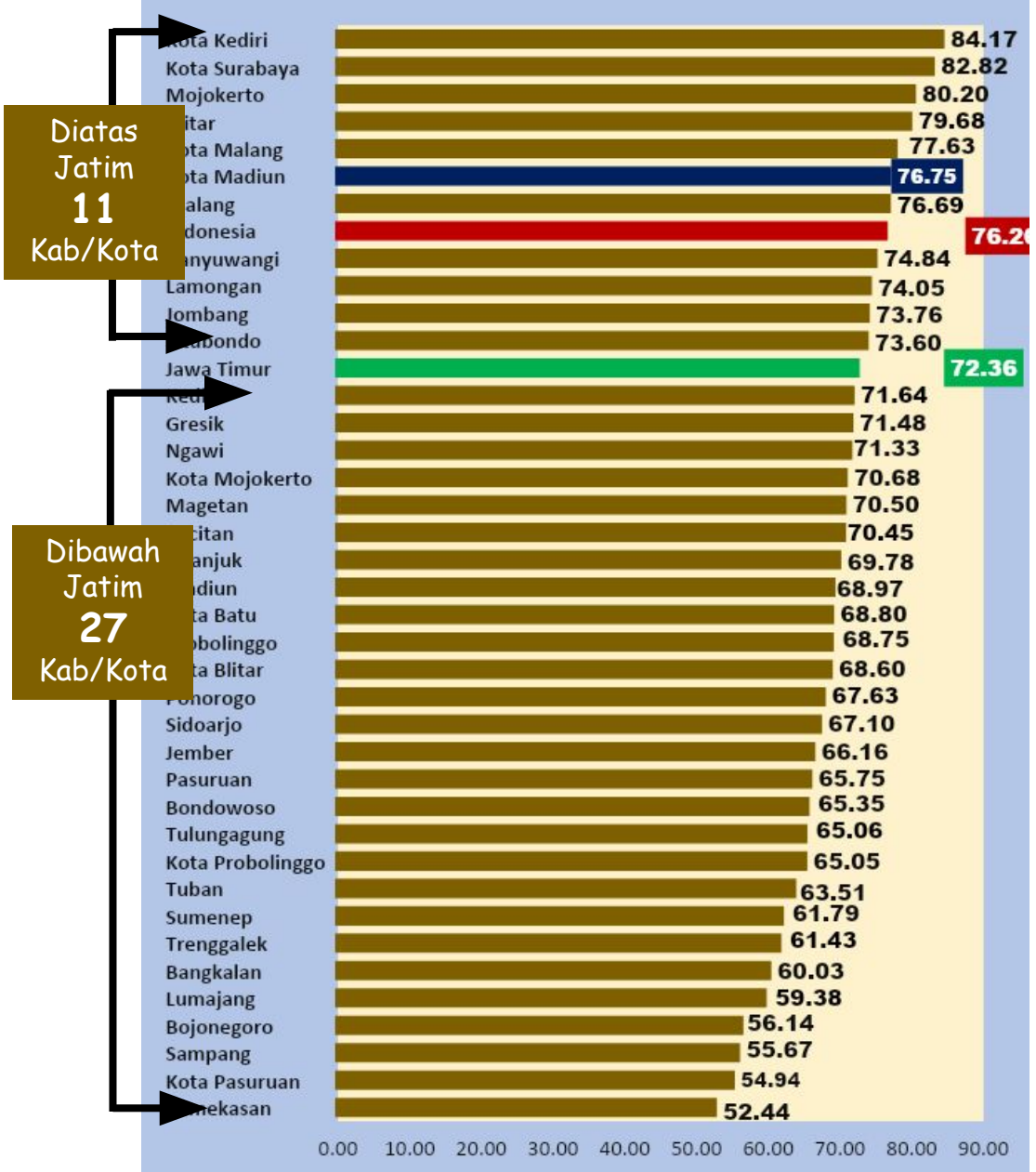
**Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan**  
(dalam Ribu Rupiah PPP)

**22.514.000 /Tahun** ↑ dari tahun 2020 **22.213.000/Th**

Design by HK 2022



## IDG JAWA TIMUR TAHUN 2021



Diatas  
Jatim  
11  
Kab/Kota

Dibawah  
Jatim  
27  
Kab/Kota

Sumber : bps.go.id

**IDG 2021** → **76,75**

**KOTA MADIUN  
PERINGKAT 6  
Se Jawa Timur**

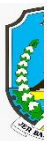
Design by HK 2022

## **Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin**

**tidak selalu bermaksud membandingkan.**

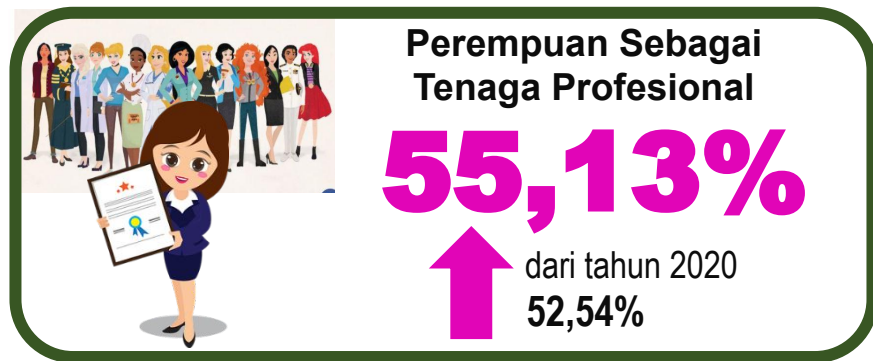
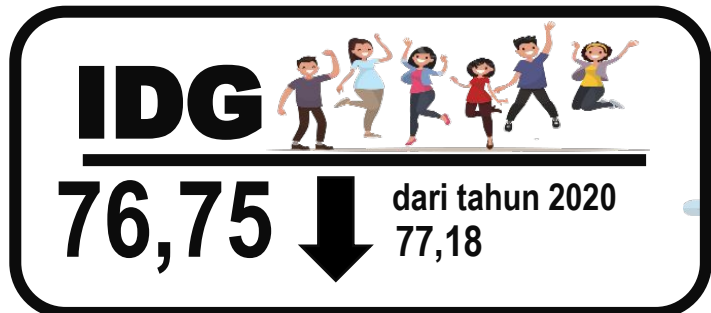
Tetapi bisa lebih untuk menjawab pertanyaan “**SIAPA**” dan “**APA**”

- ✓ SIAPA pembuat keputusan/ korban bencana/ pelaksana kegiatan dll  
Siapa yang memiliki dan menguasai manfaat akses terhadap sumber daya?
- ✓ APA peran dan kewajiban atau permasalahan masing-masing individu (sebagai perempuan; sebagai laki-laki atau anak2?)



# INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) 2021 KOTA MADIUN

Sumber : bps.go.id



**Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (bps.go.id)**

Design by HK 2022

# Mengapa Data Terpilah menurut jenis kelamin dan umur

- ❖ Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan.
- ❖ Data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin.
- ❖ Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.
- ❖ Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/ atau sebagai laki-laki (kebijakan/ program yang buta gender). Hasilnya adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan

# IDG 2020

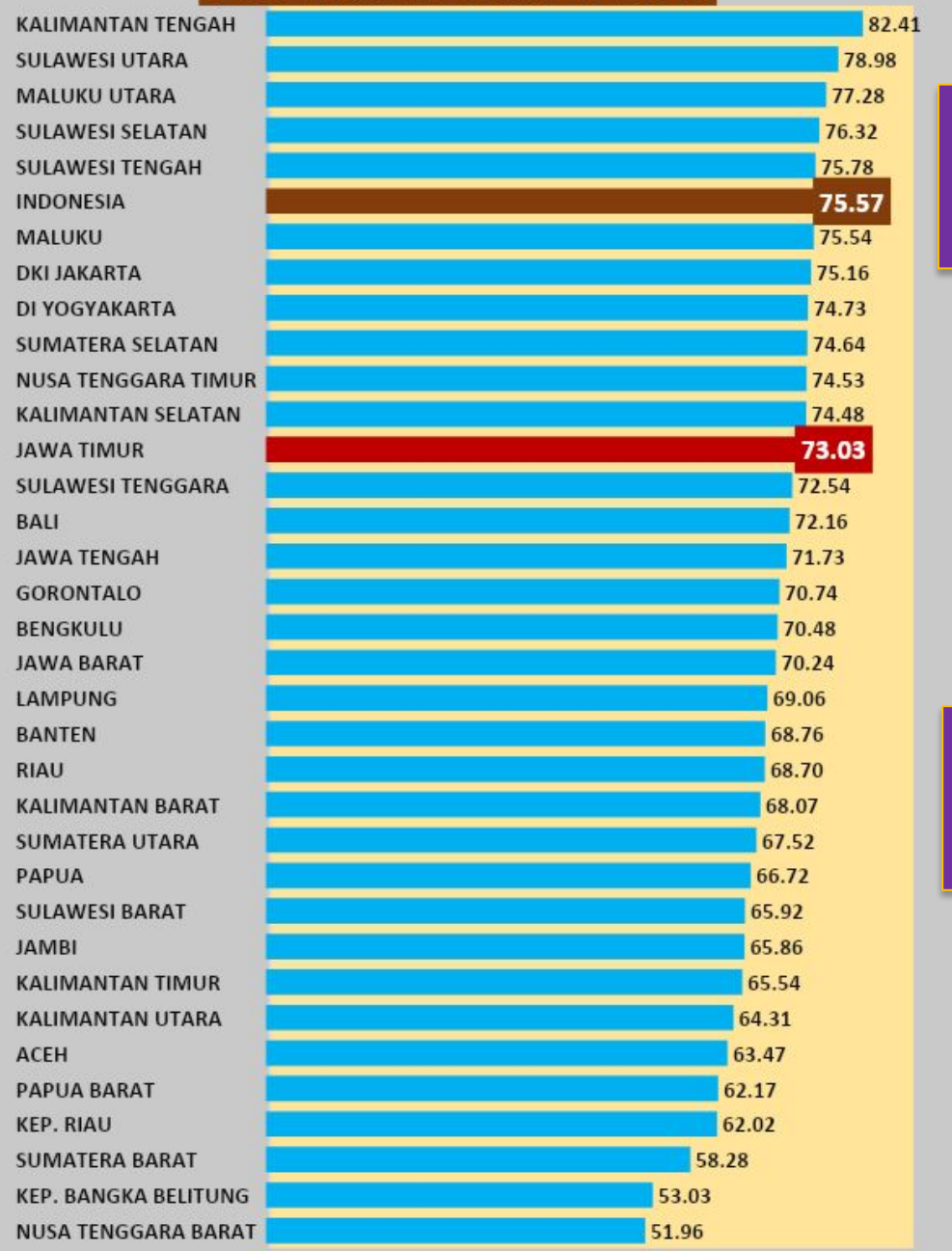
**JAWA TIMUR  
PERINGKAT  
12**



**INDEKS  
PEMBERDAYAAN  
GENDER**  
Nasional  
dan Jawa Timur

Sumber : bps.go.id

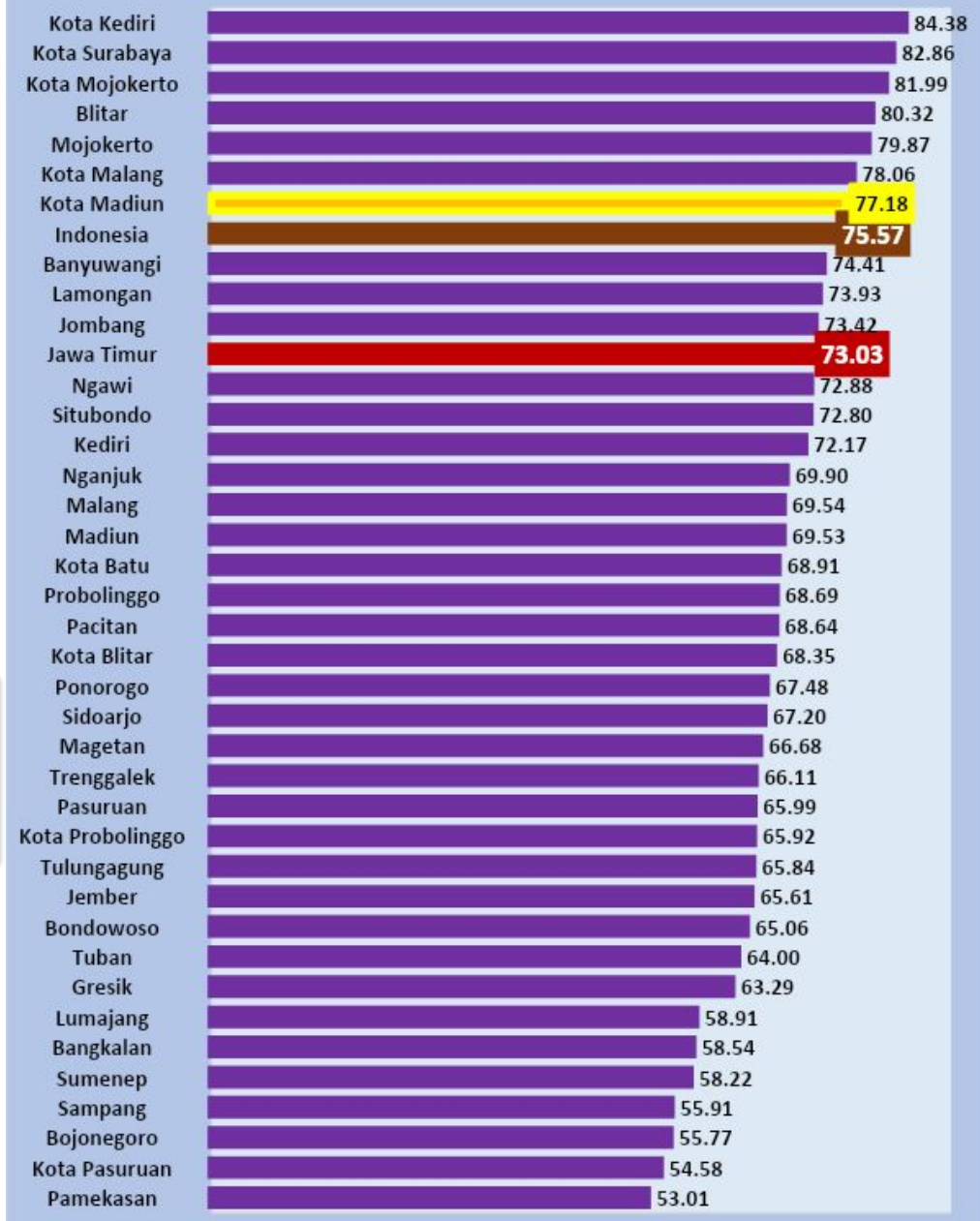
## IDG NASIONAL 2020



Diatas  
Jatim  
**10**  
Kab/Kota

Dibawah  
Jatim  
**29**  
Kab/Kota

## IDG SE JAWA TIMUR TAHUN 2020





# IDG 2020

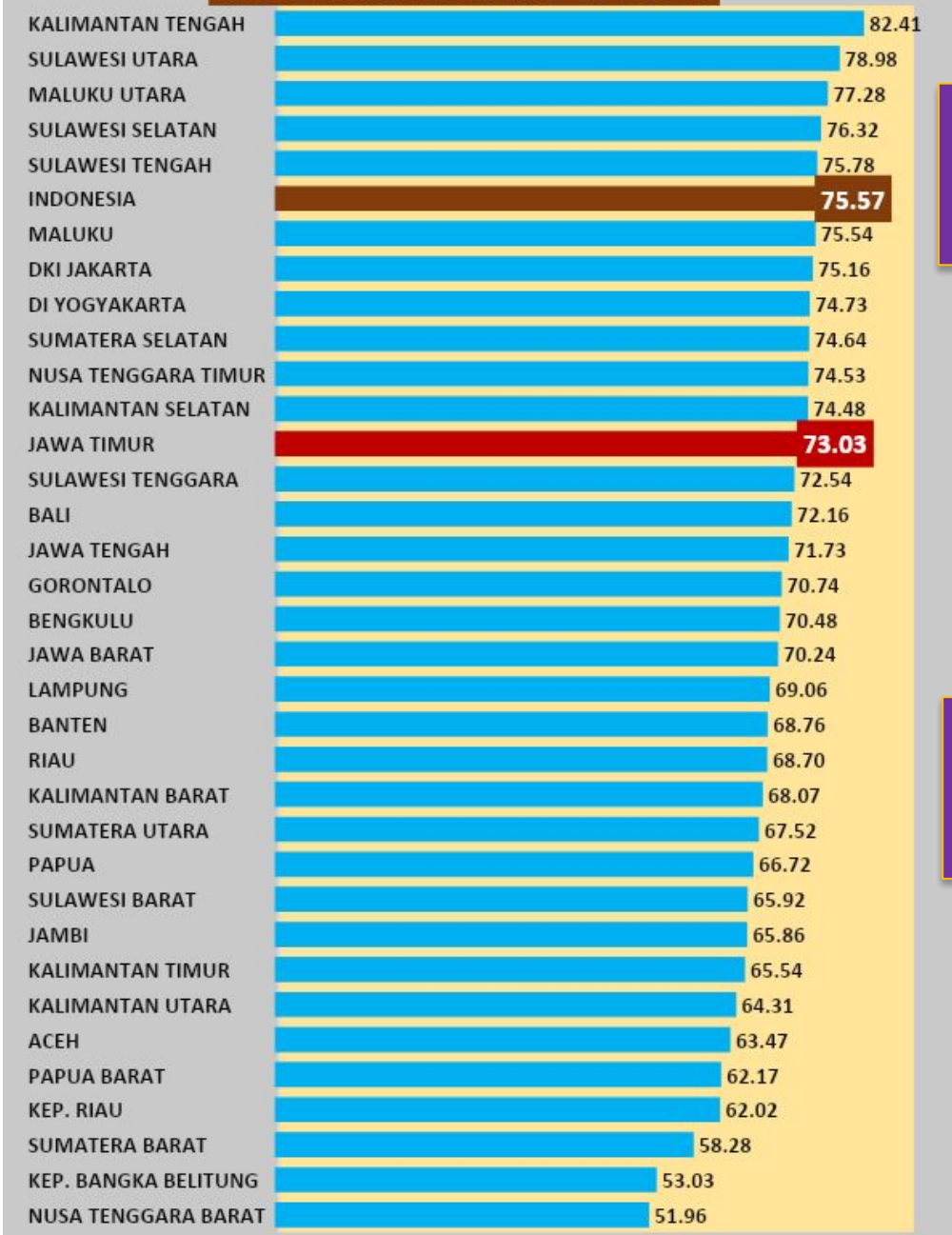
**JAWA TIMUR  
PERINGKAT  
12**



**INDEKS  
PEMBERDAYAAN  
GENDER**  
Nasional  
dan Jawa Timur

Sumber : bps.go.id

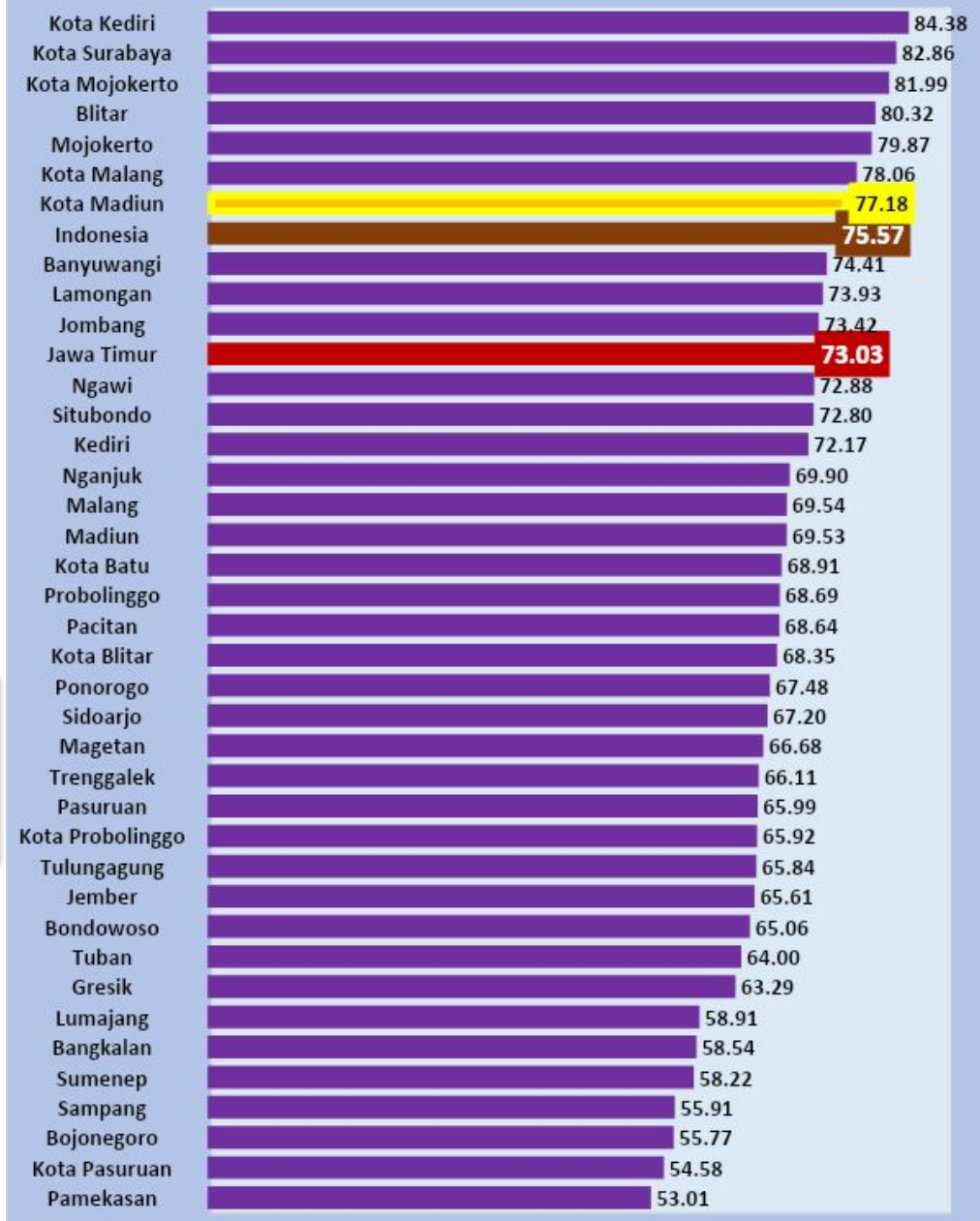
## IDG NASIONAL 2020



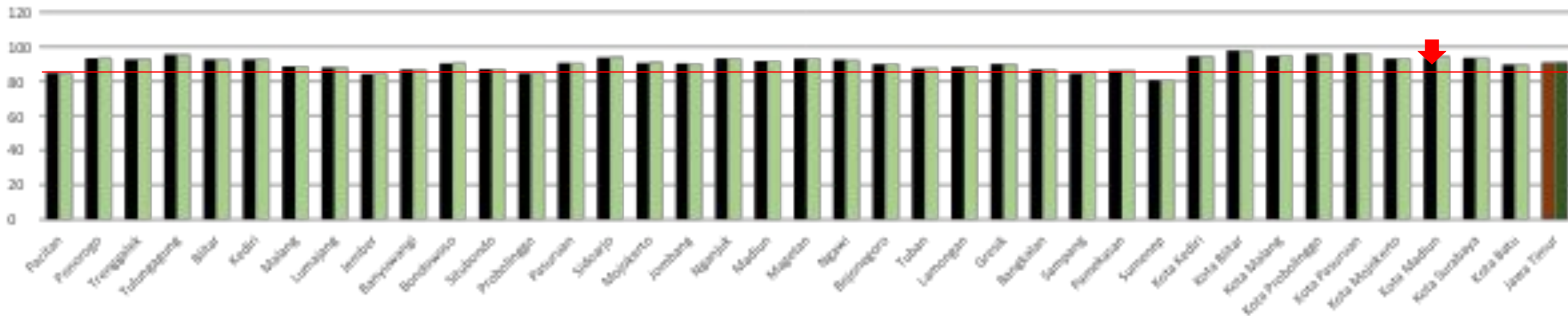
Diatas  
Jatim  
10  
Kab/Kota

Dibawah  
Jatim  
29  
Kab/Kota

## IDG SE JAWA TIMUR TAHUN 2020

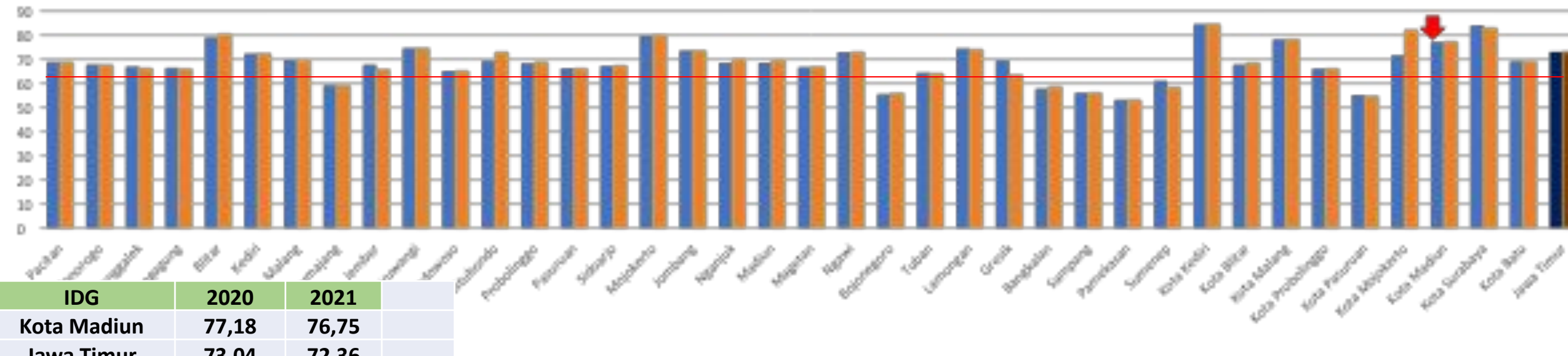


## CAPAIAN IPG KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 & 2021



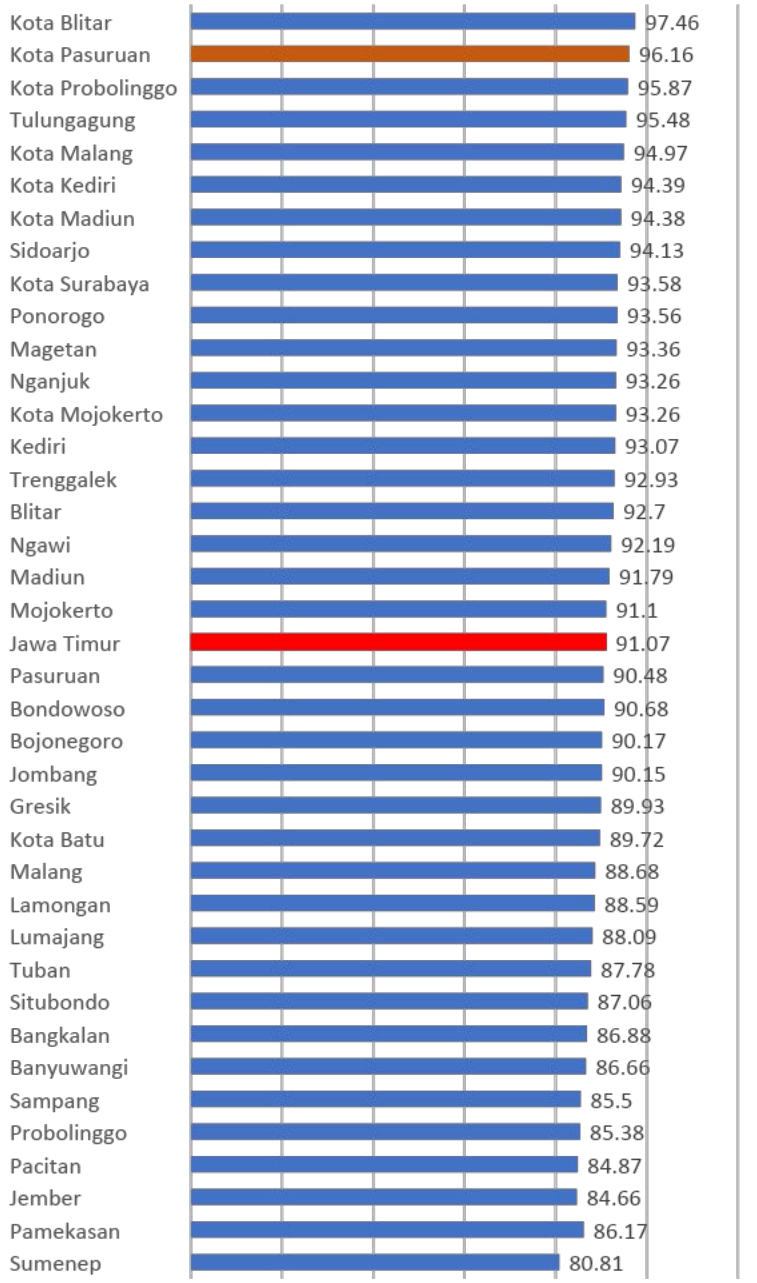
IPG	2020	2021
Kota Madiun	94,38	94,42
Jawa Timur	91,07	91,67

## IDG KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 & 2021



IDG	2020	2021
Kota Madiun	77,18	76,75
Jawa Timur	73,04	72,36

# IPG JATIM 2020



**IPG Tertinggi = Kota Blitar**

**IDG Tertinggi = Kota Kediri**

**IPG Terendah = Sumenep**

**IDG Terendah = Pamekasan**

# IDG JATIM 2020

KABUPATEN



# STATISTIK GENDER

- Statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik.
- Statistik Gender merupakan **hasil analisa lebih lanjut dari** Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Usia.

## STATISTIK GENDER :

- ADANYA PENINGKATAN PERSENTASE KELULUSAN LAKI DARI PADA PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
- RASIO GURU LAKI YANG TERSERTIFIKASI LEBIH RENDAH DARIPADA DAN PEREMPUAN YANG TERSERTIFIKASI,
- PERSENTASE PESERTA KB LAKI CENDERUNG MENINGKAT JUMLAHNYA DIBANDINGKAN DAN PEREMPUAN.
- PEDAGANG PEREMPUAN DI PASAR LEBIH BANYAK JUMLAHNYA DARIPADA PEDAGANG LAKI<sup>2</sup>

# Statistik Gender diperlukan untuk ...

1. Statistik gender diperlukan untuk memberikan **bukti** sebagai tentang kondisi lapangan dan keperluan pengembangan kebijakan.
2. Statistik gender memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem statistik keseluruhan, mendorongnya untuk **menggambarkan lebih akurat secara penuh kegiatan dan karakteristik sasaran**, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki
3. Statistik gender merupakan **dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi, kebutuhannya dll**
4. Statistik gender juga diperlukan untuk penelitian untuk **mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan/pengembangan kebijakan.**

# Dalam Pembangunan Responsif Gender

## □ Daerah wajib memenuhi 7 Prasyarat PUG (SKB 4 MENTRI)

### 1. KOMITMEN :

ADANYA REGULASI PUG  
DIDAERAH (PERDA PUG,  
PERGUB DAN SE )

### 3. KELEMBAGAAN PUG

POKJA PUG ; Fokal Point  
PUG; Tim Teknis; RAD;  
UPT /UNIT PPA

### 5. DATA & SISTEM INFORMASI DATA

TERPILAH : ADANYA FORUM  
DATA; DATA/ STATISTIK YANG  
TERPILAH TERSEDIA NYA SIM

7. **Partisipasi Masyarakat**  
MELIBAT-AKTIFKAN  
JEJARING MELALUI  
KEMITRAAN DG LM, PT,  
DUNIA USAHA, MEDIA DLL

2. **KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM RESPONSIVE  
GENDER** : RPJMD, RENJA,  
RENSTRA, KUA PPAS

### 4. SUMBER DAYA

SDM yang terlatih TT pug  
(FASILITATOR, OPD) DAN  
ANGGARAN & FASILITAS

6. **Pelaksanaan**  
**Penyusunan PPRG dan**  
**Monev** : Penyusunan GAP  
GBS,TOR; Adanya Modul &  
panduan ; ARG 25 % dr 2020



# PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA

## BAB IV PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data bencana meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan diseminasi informasi.

### **A.** Pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data bencana terdapat dua jenis data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh Pusdalops PB atau Posko Tanggap Darurat.

Data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Pengumpulan data statis dilakukan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD provinsi dan Sekretariat BPBD kabupaten/kota.

Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah data statis, meliputi data kejadian bencana, korban, kerusakan dan taksiran kerugian. Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis terdapat pada lampiran.

## B. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format '*worksheet*' atau menggunakan aplikasi khusus DIBI.

Proses selanjutnya adalah verifikasi data oleh BPBD provinsi, kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data.

## C. Analisis Data

Jenis analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data, adalah :

1. Analisis komposisi yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur.

**BELUM MENUNJUKKAN  
ADANYA ARAHAN DATA  
TERPILAH**

2. Analisis temporal yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi.
3. Analisis statistik yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dampak bencana serta hubungan sebab-akibat.
4. Analisis spasial yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi DIBI.

## D. Penyajian dan Diseminasi Informasi

Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara '*online*' melalui '*website*'.



# JUKNIS PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI BENCANA

		<p>14. Kecelakaan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi kejadian</li> <li>- Jenis industri</li> <li>- Akibat-akibat lain, seperti kebocoran limbah, dsb.</li> </ul>	
		15. Kejadian Luar Biasa (KLB)	
		16. Konflik Sosial (Huru Hara)	
		17. Aksi Teror	
		18. Sabotase	
<b>2</b>	<b>Korban Jiwa</b>		
<b>2.a</b>	<b>Jumlah Korban</b>	<p>Isi dengan total jumlah korban untuk setiap kategori, bedakan menurut usia dan jenis kelamin korban.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ usia anak: 0-16 tahun</li> <li>❖ usia dewasa: 17-60 tahun</li> <li>❖ lansia: &gt; 65 tahun</li> </ul> <p><i>Pengertian dari kondisi/status korban dapat dilihat di hal. 6 (poin 28-32) - Peraturan Kepala BNPB No.8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengamatan dan Validasi BPBD Kabupaten/ Kota</li> <li>❖ Laporan dari Instansi/ Organisasi lain</li> <li>❖ Laporan dari relawan</li> <li>❖ Cross check dengan media</li> <li>❖ Laporan dari rumah sakit, puskesmas</li> <li>❖ Laporan dari warga</li> </ul>
<b>2.b</b>	<b>Data Korban</b>		
<b>2.b.1</b>	<b>Meninggal</b>	Isi dengan nama korban yang meninggal, alamat korban, jenis kelamin korban, usia korban, ahli waris/keluarga korban dan keterangan (jika perlu)	
<b>2.b.2</b>	<b>Hilang</b>	Isi dengan nama korban yang hilang, alamat korban, jenis kelamin korban, usia korban, ahli waris/keluarga korban dan keterangan (jika perlu)	

# PERKA BNPB NO 8 TAHUN 2011 TTG SRANDARISASI DATA KEBENCANAAN

## DATA TANGGAP DARURAT

Data tanggap darurat merupakan rekapitulasi kejadian bencana mulai dari tempat kejadian, korban sampai dengan dampak yang ditimbulkan. Formulir ini diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan tanggap darurat dengan petunjuk pengisian seperti **Lampiran 2**.

### Formulir Kejadian Bencana (Form KB)

#### 1. Kejadian Bencana

Jenis Bencana : .....

Tanggal Kejadian : .....

Waktu Kejadian : .....

Lokasi Bencana : .....

Lokasi

- Provinsi : .....
- Kabupaten : .....
- Daerah Cakupan Bencana (desa/ke,kec) : .....

Letak Geografi

- Koordinat Bencana (Long X, Lat Y) : .....
- Cakupan Dampak Bencana (luas dan tinggi genangan, untuk bencana banjir) (Panjang, Lebar, Radius): .....

Penyebab Bencana : .....

Deskripsi : .....

Kondisi Cuaca : .....

#### 2. Korban Jiwa

##### a. Jumlah Korban

No	Korban	Anak-anak		Dewasa		Lansia		Ibu hamil	Total	
		L	P	L	P	L	P	P	L	P
1.	Meninggal									
2.	Hilang									
3.	Luka Berat									
4.	Luka Ringan									
5.	Pengungsi									
6.	Penderita / terdampak									

#### b. Data Korban

##### b.1 Meninggal

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Ahli Waris	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst						

##### b.2 Hilang

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Lokasi Hilang	Ahli Waris	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst							

##### b.3 Luka Ringan

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

##### b.4 Luka Berat

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Status Medis Dirujuk/Dirawat	Lokasi Nama RS	Keterangan
1.							
2.							
3.							
dst							

##### b.5 Lokasi Pengungsi

No	Kode Lokasi	Lokasi	Alamat	Kapasitas	Jenis Hunian *)	Keterangan
1.						
2.						
3.						
Dst						

# Kesetaraan Gender membawa Jawa Timur

Adil dan Sejahtera  
bagi semua rakyatnya

*Terima kasih*

